



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018

TENTANG

PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI  
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam pelaksanaannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan perdagangan global dan upaya peningkatan perekonomian nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengeluaran Ruminansia Ternak Kecil dan Babi dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 428);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN BABI DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ruminansia Kecil adalah kelompok hewan mamalia yang memamah biak dan mempunyai empat buah perut, yaitu retikulum, rumen, omasum dan abomasum, meliputi kambing dan domba/biri-biri.
2. Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi adalah kegiatan untuk mengeluarkan ruminansia kecil dan babi dari wilayah negara Republik Indonesia.
3. Rekomendasi Pengeluaran yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya kepada Pelaku Usaha yang akan mengeluarkan ternak potong.
4. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami Hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
5. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis.
6. Kode HS adalah bahasa Numerik secara klasifikasi produk atau bahan produk sebagai standar internasional untuk pelaporan barang di bea cukai dan instansi pemerintah.

7. Pelaku Usaha adalah badan usaha, baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanian.
9. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan produksi ternak serta kesehatan hewan.
10. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala Pusat PVTTP adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perlindungan, pendaftaran varietas tanaman, serta pelayanan perizinan dan rekomendasi teknis pertanian.
11. Dinas Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Dinas Provinsi adalah unsur perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan/atau kesehatan hewan.

#### Pasal 2

- (1) Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha setelah mendapat izin pengeluaran dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Izin pengeluaran sebagaimana dikmaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat Rekomendasi dari Menteri.
- (3) Menteri dalam memberikan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya dimandatkan kepada Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 3

Rekomendasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menjadi dasar pemberian izin pengeluaran yang diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB II

PENGELUARAN

Bagian Kesatu

Persyaratan Pengeluaran

Pasal 4

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

Pasal 5

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. akta pendirian perusahaan dan perubahannya disertai pengesahan dari instansi yang berwenang;
  - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas pimpinan perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan konfirmasi status wajib pajak;
  - d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
  - e. rekomendasi Dinas Provinsi;
  - f. laporan realisasi pengeluaran; dan
  - g. surat pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f tidak berlaku bagi Pelaku Usaha yang pertama kali melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi.

#### Pasal 6

- (1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
  - a. status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal;
  - b. memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan (*health requirement*) di negara tujuan; dan
  - c. untuk Ruminansia Kecil dan Babi hasil persilangan dengan berat paling kurang 25 (dua puluh lima) kg per ekor.
- (2) Keterangan status kesehatan daerah asal dan lokasi peternakan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh dokter hewan berwenang.
- (3) Ruminansia Kecil dan Babi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil persilangan dan bukan rumpun dan/atau galur yang ditetapkan atau dilepas oleh Menteri.

#### Pasal 7

Ruminansia Kecil dan Babi yang dapat dikeluarkan sesuai Kode HS seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Memperoleh Rekomendasi

#### Pasal 8

Untuk memperoleh Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Kepala Pusat PVTTP secara daring sesuai Format-1.

#### Pasal 9

Kepala Pusat PVTTP setelah menerima permohonan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja telah selesai melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran persyaratan administrasi.

Pasal 10

Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9:

- a. persyaratan administrasi tidak benar dan/atau tidak lengkap, permohonan ditolak; atau
- b. persyaratan administrasi benar dan lengkap, permohonan diterima.

Pasal 11

- (1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada pemohon disertai alasan penolakan sesuai Format-2.
- (2) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b disampaikan oleh Kepala Pusat PVTPP kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) melakukan kajian teknis dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja harus memberikan jawaban ditolak atau disetujui.
- (2) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Permohonan ditolak disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Pelaku Usaha melalui Kepala Pusat PVTPP disertai alasan penolakan, sesuai Format-3.
- (4) Permohonan disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Rekomendasi oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, sesuai Format-4.

Pasal 13

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Kepala Pusat PVTTP.
- (2) Kepala Pusat PVTTP setelah menerima Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melalui *Indonesia National Single Window* (INSW).
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun dan dapat direalisasikan secara bertahap.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Rekomendasi dari Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan wajib mengajukan izin Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha tidak mengajukan izin pengeluaran, Pelaku Usaha harus menyampaikan laporan disertai alasan tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (3) Apabila Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan melakukan pengeluaran harus mengajukan permohonan baru.

Pasal 15

Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat tidak berfungsinya pelayanan secara daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11, dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja pelayanan perizinan dapat dilakukan secara luring.

Bagian Ketiga  
Pengangkutan

Pasal 16

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi, selain harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis harus memenuhi kaidah Kesejahteraan Hewan dalam pengangkutan.
- (2) Pemenuhan kaidah Kesejahteraan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pelaku Usaha wajib melaporkan realisasi pengeluaran kepada Direktur Jenderal sesuai Format-5.

BAB III  
PENGAWASAN

Pasal 18

Pengawasan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi dilakukan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Pasal 19

- (1) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh petugas Dinas Provinsi.
- (2) Pengawasan oleh petugas Dinas Provinsi dilakukan di tempat usaha peternakan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kesesuaian persyaratan teknis.

Pasal 20

Pengawasan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan berdasarkan laporan realisasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan/atau Babi, sesuai Format-5 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV  
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21

- (1) Pelaku Usaha yang tidak mengajukan izin pengeluaran setelah mendapatkan Rekomendasi dan tidak melaporkan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 3 (tiga) bulan.
- (2) Pelaku Usaha yang tidak melaporkan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi peringatan tertulis, dan apabila tidak dilaksanakan dikenakan sanksi tidak diterbitkan Rekomendasi untuk waktu masa pengeluaran 6 (enam) bulan.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Rekomendasi Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi yang diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai habis masa berlaku.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Persetujuan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Ke Dalam dan Keluar Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 571), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

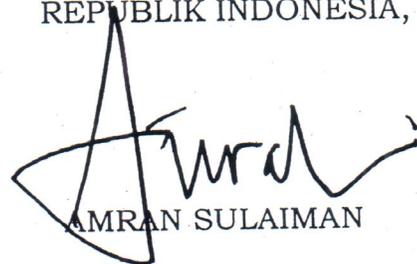
Pasal 24

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 05 Januari 2018

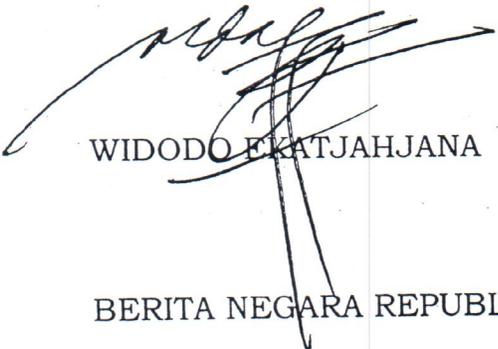
MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 39

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018

TANGGAL 05 Januari 2018

TENTANG

PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL

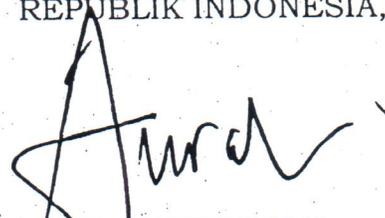
DAN BABI DARI WILAYAH NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR RUMINANSIA KECIL DAN BABI  
YANG DIATUR PENGELUARANNYA  
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO	POS TARIF/HS	JENIS TERNAK
	01.03	Babi hidup
		- Lain-lain
1	0103.91.00	- - Berat kurang dari 50 Kg
2	0103.92.00	- - Berat 50 Kg atau lebih
	01.04	Biri-biri dan kambing hidup
	0104.10	- Biri-biri
3	0104.10.90	- - Lain-lain
	0104.20	- Kambing
4	0104.20.90	- - Lain-lain

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 02/PERMENTAN/PK.230/1/2018

TANGGAL : 05 Januari 2018

TENTANG

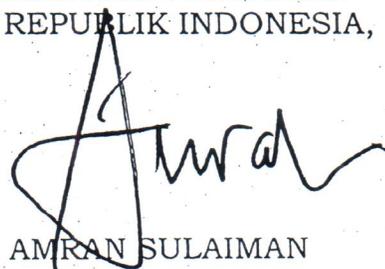
PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL

DAN BABI DARI WILAYAH NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

NO	FORMAT	TENTANG	DITANDATANGANI
1	Model-1	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	Pemohon, Pimpinan Perusahaan
2	Model-2	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	Kepala Pusat PVTPP
3	Model-3	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
4	Model-4	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	an. Menteri Pertanian Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
5	Model-5	Permohonan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi	Direktur

MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Persetujuan  
Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

Kepada Yth;

Menteri Pertanian  
Cq. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian  
Jl. Harsono RM No.3 Ragunan  
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama / Nama Perusahaan :  
Alamat :  
Surat Izin Usaha Peternakan :  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :

dengan ini mengajukan permohonan Rekomendasi persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dalam rangka meningkatkan pemasaran dengan perincian sebagai berikut:

1. Jenis :
2. Galur / Ras/ Bangsa :
3. Jumlah (ekor) :
4. Bobot Badan :
5. Tujuan :
4. Asal ternak potong :
5. Negara tujuan :
6. Perusahaan penerima :
7. Pelabuhan asal pengeluaran :
8. Pelabuhan tujuan pemasukan :
9. Jadwal Pengiriman :

Sebagai kelengkapan terlampir disampaikan sertifikat kesehatan hewan yang diterbitkan oleh dokter hewan Kabupaten/Kota yang berwenang.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.

Pemohon,  
Pimpinan Perusahaan  
Ditandatangani dan Cap

Meterai Rp.6000,=

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
2. Kepala Badan Karantina Pertanian di Jakarta
3. Direktur Kesehatan Hewan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta
4. Kepala Dinas Yang Membidangi Fungsi Peternakan dan Kesehatan Provinsi .....

Nomor :  
 Lampiran :  
 Perihal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan  
 Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

Kepada Yth;  
 .....

Jl.....  
 .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dengan ini diberitahukan permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

.....  
 .....  
 .....  
 .....

Saran / Arahan :

.....  
 .....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

KEPALA PUSAT PVTPP,

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan Rekomendasi Persetujuan  
          Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi

Kepada Yth;  
.....  
Jl.....  
.....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal permohonan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolak dengan alasan :

.....  
.....  
.....  
.....

Demikian disampaikan, agar menjadi maklum.

DIREKTUR JENDERAL  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

( ..... )

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Pertanian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian
3. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR

T E N T A N G

REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGELUARAN RUMINANSIA KECIL DAN  
BABI DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan devisa negara, perlu dilakukan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi ke luar Wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengeluaran Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi yang sehat dan bermutu, dipandang perlu untuk menetapkan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Keputusan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 157/M tentang pengangkatan Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor ... tentang Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi Dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara Nomor .... tanggal....
2. Surat Rekomendasi Dinas Peternakan provinsi .... nomor... tanggal...
3. Surat Pertimbangan Teknis Kepala Badan Karantina Pertanian Nomor ... tanggal ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Ruminansia Kecil dan Babi dari wilayah negara Republik Indonesia, kepada:

Nama : .....

Alamat : .....

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jenis :
- b. Galur/Ras/Bangsa :
- c. Jumlah :
- d. Tujuan :
- e. Bobot badan :
- f. Negara Asal Ternak :
- g. Provinsi Pengeluaran
- h. Daerah Pengeluaran :
- i. Daerah Pemasukan :
- j. Pelabuhan Pengeluaran:
- k. Pelabuhan Pemasukan :
- l. Pelaksana ekspor :
- m. Masa berlaku : ... s.d ... (120 hari kalender)

KEDUA : Pelaksanaan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus memenuhi persyaratan teknis Budidaya Ternak dan Persyaratan Kesehatan Hewan sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.

KETIGA : Pemegang Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib melaporkan realisasi pengeluaran ternak potong selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah tiba di pelabuhan pemasukan dengan melampirkan foto copy surat keterangan *Bill of Lading* yang diimpor kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;

KEEMPAT : Laporan realisasi pengeluaran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian Surat Rekomendasi Pengeluaran selanjutnya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal

A.n. MENTERI PERTANIAN  
DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN,

ttd

.....  
NIP. ....

SALINAN disampaikan kepada:

1. Kepala Perwakilan RI untuk Negara.....;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan;
4. Kepala Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi ....;
5. Kepala Badan Karantina Pertanian,,
6. Kepala PPVTPP

LAPORAN REALISASI PENGELUARAN RUMINANSIA TERNAK KECIL DAN BABI

Nama Perusahaan :  
 Alamat Kantor Pusat :  
 Masa Berlaku :  
 Nomor dan tanggal SPI/E :  
 Masa Berlaku :  
 Nomor dan tanggal RPP/RPP-I :

NO	POS TARIF/HS	JENIS / BANGSA	PERSETUJUAN PENGELUARAN		NO & TGL. PIB/PEB*	REALISASI PENGELUARAN			PELABUHAN*	Nomor Bill of Lading	Nama/Ta nda Tangan Petugas Pelabuhan Asal Pengeluar an dan Cap (Stamp)	
			JUMLAH VOLUME (EKOR)	NILAI (US\$)		JUMLAH VOLUME (EKOR)	NILAI (US\$)	SISA REALISASI (EKOR)				PENGELUARAN

Keterangan :

\*) No. Bill of Lading dilampirkan

Tembusan :  
 Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jakarta,.....  
 PT/CV.....

Direktur